



Penguatan Akuntabilitas Koperasi Merah Putih Desa Karangjaya melalui Sistem Administrasi dan Pelaporan Keuangan Sederhana

Fertika Puspita Dewi ^{1*}, Laela Susanto ², Asri Tresnawati ³, Muhammad Zulfan Faitzal ⁴

Affiliation

^{1,3} Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi, Universitas Mayasari Bakti, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

^{2,4} Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Vokasi, Universitas Mayasari Bakti, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi, Universitas Mayasari Bakti, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Email: fertikapd@gmail.com.

Funding Information

Universitas Mayasari Bakti.

Article History

Received: 12 Aug 2026.

Revised: 14 Aug 2026.

Accepted: 19 Oct 2026.

Available online: 1 November 2026.

Published: 1 December 2026.

Abstract

Koperasi Merah Putih in Karangjaya Village faces administrative constraints: transactions were recorded in unstandardised notebooks, member cards were absent, and periodic financial reports were never compiled. This program established a simple, applicable, and sustainable administration and financial reporting system to strengthen accountability. Training and mentoring were conducted on 27–28 July 2026 involving 25 participants from cooperative management, members, and Family Welfare Empowerment (PKK) cadres. A 20-item pretest-posttest within a one-group design showed a mean score increase from 41 to 81 (+40 points on a 0–100 scale). Practically, participants completed the cooperative cash book for semester I 2026, member cards, and simple cash and residual income (SHU) reports independently. Seven administrative formats and spreadsheet templates were handed over, alongside forming a three-person core team. Primary obstacles included irregular recording, mixing of cooperative-personal cash, and limited computer literacy. Follow-up focuses on reporting under Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) and preparation for the annual member meeting.

Keywords

Cooperative Administration; Financial Report; Accountability; Village Economic Institution.

Abstrak

Koperasi Merah Putih Desa Karangjaya menghadapi kendala administrasi: transaksi dicatat pada buku tulis biasa, kartu anggota belum tersedia, dan laporan keuangan periodik belum pernah disusun. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun sistem administrasi dan pelaporan keuangan sederhana guna memperkuat akuntabilitas koperasi. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan pada 27–28 Juli 2026 dengan 25 peserta yang mencakup pengurus, pengawas, anggota, dan kader PKK. Melalui rancangan satu kelompok dengan pretest-posttest 20 butir, skor rata-rata pengetahuan meningkat dari 41 menjadi 81 (+40 poin pada skala 0–100). Secara praktis, peserta berhasil mengisi buku kas semester I tahun 2026, kartu simpanan dan pinjaman anggota, serta menyusun laporan kas dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sederhana secara mandiri. Program ini juga menyerahkan tujuh format administrasi beserta template lembar kerja dan membentuk tim administrasi inti beranggotakan tiga orang. Hambatan utama meliputi kebiasaan mencatat yang belum rutin, percampuran kas koperasi dengan pribadi, serta keterbatasan literasi komputer. Tindak lanjut diprioritaskan pada pelaporan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan persiapan Rapat Anggota Tahunan.

Kata Kunci

Administrasi Koperasi; Laporan Keuangan; Akuntabilitas; Kelembagaan Ekonomi Desa.

1 | PENDAHULUAN

Koperasi desa menempati posisi strategis dalam agenda penguatan ekonomi masyarakat karena berfungsi sebagai penyedia akses permodalan, wadah usaha bersama, dan sarana distribusi manfaat ekonomi kepada anggota. Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa memperluas peran tersebut dengan menempatkan koperasi sebagai instrumen tata kelola ekonomi lokal (Saputri *et al.*, 2025). Kajian terbaru menegaskan bahwa efektivitas koperasi desa sangat bergantung pada dukungan sistem administrasi, laporan keuangan, dan kapasitas kelembagaan yang memadai, bukan semata pada besarnya modal yang dihimpun (Delima *et al.*, 2026; Junaidi *et al.*, 2025). Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan salah satu desa binaan Kawan Lokal, yaitu komunitas sekaligus perusahaan agen wisata yang berperan sebagai wadah pengembangan potensi desa di Kabupaten Tasikmalaya. Kawan Lokal mendampingi desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal, wisata desa, produk kreatif, serta kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk Koperasi Merah Putih di setiap desa binaan. Posisi mitra menjadi penting karena jejaring pendampingan yang dimilikinya memungkinkan hasil kegiatan direplikasi di desa binaan lainnya. Observasi lapangan dan diskusi awal bersama pengurus koperasi serta mitra mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam tata kelola keuangan. Pencatatan transaksi masih dilakukan pada buku tulis biasa tanpa pemisahan jenis transaksi, sehingga posisi kas koperasi tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Selain itu, kartu simpanan dan kartu pinjaman anggota belum tersedia, yang mengakibatkan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pokok pinjaman, maupun angsuran anggota tidak terdokumentasi secara terpisah. Kondisi tersebut diperkuat oleh ketiadaan laporan keuangan periodik dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga pengurus tidak memiliki dasar pertanggungjawaban yang dapat disampaikan kepada anggota. Persoalan mitra dengan demikian tidak semata-mata berupa keterbatasan pengetahuan, melainkan belum terbentuknya kebiasaan dan perangkat kerja administratif yang dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia di desa.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan pada koperasi sejenis. Koperasi Merah Putih di berbagai daerah masih menghadapi kendala berupa pencatatan keuangan manual, ketiadaan laporan keuangan periodik, lemahnya kontrol internal, serta keterbatasan kompetensi pengurus dalam bidang akuntansi dan manajemen koperasi (Megasyara *et al.*, 2025). Keterbatasan administratif tersebut berdampak langsung pada akuntabilitas, padahal akuntabilitas dan transparansi terbukti berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan koperasi (Rubiyanthy *et al.*, 2025). Tanpa informasi keuangan yang jelas dan terbuka, koperasi kesulitan menilai kondisi usaha, mengukur perkembangan modal, mengelola risiko pinjaman, serta menyusun pertanggungjawaban kepada anggota. Sejumlah program pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan koperasi dapat meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, khususnya ketika materi mencakup penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan unit simpan pinjam (Sumatriani *et al.*, 2025), serta ketika pelatihan diarahkan langsung untuk meningkatkan kompetensi pengurus Koperasi Merah Putih (Refianto, 2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada koperasi desa dan serba usaha juga terbukti membantu pengurus menghasilkan laporan yang lebih tertib (Nasihin *et al.*, 2026; Suripto *et al.*, 2023). Pengalaman pada pelaku usaha mikro memperlihatkan bahwa pelatihan pencatatan sederhana baru membuahkan hasil apabila disertai pendampingan berulang dan penggunaan kasus nyata (Endarti & Candra, 2026; Palasari *et al.*, 2025; Rahmadhani & Astuti, 2024). Namun demikian, banyak pelatihan akuntansi koperasi masih tersaji terlalu teknis sehingga sulit diterapkan oleh pengurus yang tidak berlatar belakang akuntansi. Kebaruan praktis kegiatan ini terletak pada penyediaan perangkat administrasi berjenjang melalui format manual dan template lembar kerja dengan struktur kolom identik, sehingga peserta dengan tingkat literasi komputer yang berbeda tetap dapat menerapkan sistem yang sama, serta pemanfaatan data transaksi riil koperasi sebagai bahan praktik langsung, bukan kasus simulasi. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai administrasi dan akuntabilitas koperasi, membentuk keterampilan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana, menghasilkan perangkat administrasi yang siap pakai, serta merumuskan rencana pendampingan lanjutan yang berkelanjutan.

2 | LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas dan Tata Kelola Koperasi

Akuntabilitas dalam konteks koperasi dipahami sebagai kewajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, simpanan, pinjaman, dan hasil usaha kepada anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Tata kelola koperasi yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan (Rizki *et al.*, 2024). Penerapan prinsip tersebut pada koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola yang sehat tidak cukup hanya dinyatakan dalam anggaran dasar, melainkan harus tercermin dalam praktik pencatatan dan pelaporan sehari-hari (Sunaryo *et al.*, 2023), termasuk dalam aspek kepatuhan kelembagaan Koperasi Merah Putih yang baru dibentuk (Marzuki *et al.*, 2026). Laporan keuangan menempati posisi sentral dalam kerangka kerja ini karena berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban, alat evaluasi kinerja usaha, serta instrumen untuk membangun kepercayaan anggota. Dalam kegiatan ini, prinsip akuntabilitas diterjemahkan menjadi indikator capaian yang dapat

diperiksa secara konkret, yaitu tersusunnya laporan kas dan laporan SHU sederhana untuk periode berjalan yang dikerjakan sendiri oleh pengurus.

2.2 Pelatihan Berbasis Praktik dan Pendampingan Berkelanjutan

Pelatihan berbasis praktik memberi kesempatan kepada peserta untuk mengubah pengetahuan konseptual menjadi tindakan yang dapat diamati dan dikoreksi secara langsung. Pengalaman menyelesaikan satu siklus kerja utuh—mulai dari bukti transaksi, buku kas, rekap bulanan, hingga penyusunan laporan—memberikan rujukan konkret yang dapat diulang secara mandiri pada periode berikutnya. Pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan sederhana meningkatkan kesadaran mitra terhadap manfaat pencatatan dan membantu menyusun pembukuan yang sesuai dengan aktivitas usaha masing-masing (Andiena *et al.*, 2024). Pendekatan *learning by doing* yang disertai pengulangan juga terbukti efektif mengatasi hambatan literasi digital peserta (Endarti & Candra, 2026). Selain itu, pendekatan sekolah akuntansi komunitas menunjukkan bahwa literasi akuntansi pada organisasi masyarakat dapat ditumbuhkan melalui materi praktis seperti pencatatan kas dan penyusunan laporan sederhana, yang pada gilirannya membentuk budaya akuntabilitas kolektif (Muslim *et al.*, 2025). Dimensi keberlanjutan menjadi faktor penentu karena pelatihan satu kali cenderung tidak berlanjut pada penerapan jangka panjang; edukasi pelaporan keuangan koperasi karenanya perlu dirancang sebagai proses berjenjang agar pengurus siap menghasilkan laporan yang akurat, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode (Kamil *et al.*, 2025). Konsep ini diterjemahkan ke dalam indikator capaian berupa terisinya buku kas dan kartu anggota menggunakan data riil koperasi serta terbentuknya tim administrasi inti sebagai penanggung jawab pencatatan harian.

2.3 Sistem Administrasi Koperasi Sederhana dan Arah Digitalisasi

Sistem administrasi koperasi pada tingkat desa perlu memenuhi tiga syarat utama: cukup sederhana untuk dijalankan oleh pengurus tanpa latar belakang akuntansi, cukup lengkap untuk menghasilkan laporan yang bermakna, dan cukup baku untuk diwariskan kepada kepengurusan berikutnya. Perangkat minimal yang dibutuhkan mencakup buku kas masuk dan kas keluar, kartu simpanan anggota, kartu pinjaman dan angsuran, rekap transaksi bulanan, serta format laporan kas dan laporan SHU. Transformasi tata kelola keuangan koperasi melalui sistem informasi akuntansi terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan (Murdiono *et al.*, 2025), sebagaimana penguatan tata kelola berbasis digital pada koperasi desa binaan yang menunjukkan hasil positif selama didampingi secara intensif (Susanti *et al.*, 2025). Kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi juga menjadi kebutuhan yang menyertai penerapan standar akuntansi yang lebih tertib (Setiajatnika & Hidayat, 2026), sementara transisi dari SAK ETAP menuju SAK EP menuntut koperasi agar lebih siap menyusun laporan sesuai standar yang relevan bagi entitas privat (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Karena kegiatan ini dilaksanakan pada koperasi yang belum memiliki catatan baku sama sekali, penyediaan format dasar dan pembentukan kebiasaan mencatat ditempatkan sebagai prioritas utama. Indikator capaian yang ditetapkan adalah tersedianya tujuh format administrasi siap pakai dalam versi manual dan versi lembar kerja, sedangkan penyesuaian penuh terhadap SAK EP diposisikan sebagai target tahap lanjutan. Kaitan antara konsep, indikator capaian program, dan rujukan yang digunakan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Kaitan Konsep Landasan Teori, Indikator Capaian Program, dan Rujukan

Konsep	Indikator capaian dalam kegiatan ini	Rujukan utama
Akuntabilitas dan tata kelola koperasi	Laporan kas dan laporan SHU sederhana periode berjalan tersusun dan dapat diperiksa anggota	Rizki <i>et al.</i> (2024); Rubiyanty <i>et al.</i> (2025); Sunaryo <i>et al.</i> (2023)
Pelatihan berbasis praktik	Buku kas semester I 2026 terisi; kartu simpanan dan kartu pinjaman anggota lengkap	Andiena <i>et al.</i> (2024); Endarti & Candra (2026); Muslim <i>et al.</i> (2025)
Pendampingan berkelanjutan	Terbentuknya tim administrasi inti dan berlanjutnya pencatatan setelah pelatihan	Kamil <i>et al.</i> (2025); Suropto <i>et al.</i> (2023)
Sistem administrasi sederhana	Tujuh format administrasi siap pakai dalam versi manual dan lembar kerja	Megasyara <i>et al.</i> (2025); Nasihin <i>et al.</i> (2026)
Digitalisasi dan kesiapan SAK EP	Template lembar kerja berumus digunakan pengurus; rencana transisi pelaporan berbasis SAK EP	Murdiono <i>et al.</i> (2025); Setiajatnika & Hidayat (2025, 2026); Susanti <i>et al.</i> (2025)

Kerangka keterkaitan tersebut menegaskan bahwa setiap indikator capaian dirancang secara berjenjang guna memastikan intervensi pelatihan dan pendampingan dapat dioperasionalkan secara terukur pada tahap pelaksanaan kegiatan.

3 | METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan model pelatihan dan pendampingan berbasis praktik. Kegiatan pelatihan inti dilaksanakan pada 27–28 Juli 2026 di balai pertemuan warga Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Peserta berjumlah 25 orang yang dipilih secara purposif bersama mitra berdasarkan tiga kriteria: keterlibatan langsung dalam pengelolaan koperasi, kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dan kesediaan melanjutkan pencatatan setelah pelatihan selesai. Karakteristik sasaran dan pelaksanaan program dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Sasaran dan Pelaksanaan Program

Komponen	Keterangan
Jumlah peserta	25 orang, terdiri atas pengurus, pengawas, dan anggota Koperasi Merah Putih Desa Karangjaya serta kader PKK
Teknik pemilihan	Purposif: terlibat langsung dalam pengelolaan koperasi, bersedia mengikuti seluruh tahapan, dan bersedia melanjutkan pencatatan
Kondisi awal	Pencatatan pada buku tulis biasa; kartu simpanan anggota belum tersedia; laporan SHU belum pernah disusun
Tanggal dan lokasi	27–28 Juli 2026, balai pertemuan warga Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya
Mitra kegiatan	Kawan Lokal Kabupaten Tasikmalaya
Pola kegiatan	Sosialisasi, pelatihan, praktik mandiri dengan data riil koperasi, pendampingan, dan monitoring berkala
Rancangan evaluasi	Satu kelompok tanpa pembandingan (<i>one-group pretest-posttest design</i>) yang dilengkapi observasi praktik dan pemeriksaan dokumen

Lokasi kegiatan berada di Desa Karangjaya yang secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan Koperasi Merah Putih yang telah beroperasi, namun belum didukung sistem administrasi yang memadai, serta kesiapan jaringan kelembagaan mitra yang memungkinkan pendampingan lanjutan. Peta lokasi kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya

Peta lokasi tersebut menunjukkan posisi strategis Desa Karangjaya di wilayah timur Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki potensi kelembagaan ekonomi masyarakat binaan mitra, namun menghadapi keterbatasan akses layanan pendampingan akuntansi formal. Kegiatan intervensi dirancang dalam enam tahapan kerja yang saling berkesinambungan. Tahap persiapan dan koordinasi diawali dengan penyusunan modul, penyiapan format administrasi, serta penetapan daftar peserta bersama mitra. Tahap berikutnya berupa sosialisasi dan identifikasi kebutuhan melalui observasi pembukuan berjalan, wawancara pengurus, dan pelaksanaan *pretest*. Kegiatan inti dilanjutkan dengan pelatihan administrasi dan pencatatan transaksi kas maupun simpan pinjam, disusul pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana. Pada tahap kelima, peserta melakukan praktik mandiri menggunakan dokumen transaksi riil koperasi. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pendampingan intensif, monitoring pencatatan harian, serta pelaksanaan *posttest*. Rincian tahapan beserta indikator keberhasilannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Kegiatan dan Indikator Keberhasilan

Tahap	Kegiatan utama	Indikator keberhasilan
Persiapan	Penyusunan modul, penyiapan format administrasi, koordinasi dan penetapan peserta	Modul dan tujuh format administrasi siap digunakan
Identifikasi kebutuhan	Observasi pencatatan berjalan, wawancara pengurus, dan <i>pretest</i>	Masalah prioritas disepakati bersama mitra
Pelatihan pencatatan	Pencatatan kas masuk dan keluar, simpanan, pinjaman, dan angsuran anggota	Peserta mengenali jenis transaksi dan kolom pencatatan
Pelatihan pelaporan	Rekap transaksi bulanan, laporan kas, laporan posisi keuangan, dan laporan SHU sederhana	Peserta memahami alur bukti transaksi hingga laporan
Praktik mandiri	Pengisian buku kas dan kartu anggota menggunakan data riil koperasi	Buku kas dan kartu anggota terisi; laporan tersusun
Pendampingan dan evaluasi	Monitoring pencatatan, koreksi kesalahan, konsultasi, dan <i>posttest</i>	Tersedia data capaian dan rencana tindak lanjut

Perangkat kerja yang disiapkan meliputi buku kas masuk dan keluar, kartu simpanan anggota, kartu pinjaman dan angsuran, format rekap transaksi bulanan, format laporan kas, format laporan posisi keuangan, serta format laporan SHU sederhana. Seluruh perangkat disediakan dalam versi manual dan versi lembar kerja terkomputerisasi dengan struktur kolom yang identik. Versi terkomputerisasi dilengkapi dengan rumus otomatis untuk penjumlahan kas, saldo simpanan anggota, dan sisa pokok pinjaman. Kesetaraan struktur kolom antarversi dimaksudkan agar peserta dengan tingkat literasi komputer yang berbeda tetap menggunakan sistem pencatatan yang seragam, sehingga hasil kerja antarpengurus dapat digabungkan dan diverifikasi dengan mudah. Evaluasi pengetahuan menggunakan instrumen *pretest-posttest* berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat sebanyak 20 butir, terdiri atas 4 butir untuk masing-masing dari 5 aspek yang diukur. Skor setiap aspek dikonversi ke skala 0–100. Susunan aspek, jumlah butir, dan contoh butir instrumen disajikan pada Tabel 4. Validitas isi instrumen ditempuh melalui penilaian oleh dua dosen bidang akuntansi di luar tim penyusun soal serta uji keterbacaan kepada tiga calon peserta sebelum pelaksanaan, dengan perbaikan pada butir yang dinilai bermakna ganda. Pengujian reliabilitas secara statistik tidak dilakukan mengingat jumlah peserta yang terbatas dan sifat instrumen sebagai alat evaluasi program, sehingga hal ini dicatat sebagai keterbatasan metodologis.

Tabel 4. Aspek, Jumlah Butir, dan Contoh Butir Instrumen Pretest-Posttest

Aspek yang diukur	Jumlah butir	Contoh butir
Fungsi administrasi dan akuntabilitas koperasi	4	Kepada siapa pengurus koperasi wajib bertanggungjawabkan pengelolaan simpanan anggota?
Pencatatan kas masuk dan kas keluar	4	Setoran simpanan wajib anggota dicatat pada kolom kas masuk atau kas keluar? Jelaskan alasannya.
Pencatatan simpanan, pinjaman, dan angsuran anggota	4	Seorang anggota menyeter angsuran Rp250.000 yang terdiri atas pokok Rp200.000 dan jasa Rp50.000. Pada kolom mana masing-masing dicatat?
Penyusunan laporan keuangan sederhana	4	Urutkan alur kerja dari bukti transaksi hingga laporan kas bulanan.
Penyusunan laporan SHU dan penggunaan template	4	Unsur apa saja yang diperlukan untuk menghitung SHU pada laporan sederhana koperasi?

Selain tes pengetahuan, hasil pencatatan peserta diperiksa menggunakan rubrik sederhana dengan tiga kriteria penilaian: kelengkapan pengisian kolom, ketepatan klasifikasi transaksi, serta kesesuaian saldo akhir dengan bukti transaksi dan kas fisik. Setiap kriteria dinilai dalam tiga kategori, yaitu belum sesuai, sebagian sesuai, dan sesuai. Dokumen dinyatakan layak apabila seluruh kriteria berada pada kategori sesuai, sedangkan dokumen yang belum layak dikoreksi bersama peserta pada sesi pendampingan. Monitoring setelah pelatihan dilaksanakan sebanyak tiga kali selama Agustus 2026, yang mencakup dua kunjungan lapangan dan satu sesi konsultasi daring, dengan agenda pemeriksaan buku kas, penelusuran bukti transaksi, serta pembahasan kendala teknis pencatatan. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan skor rata-rata dan perubahan poin pada skala 0–100, sedangkan data kualitatif berupa hasil observasi praktik, pemeriksaan dokumen pembukuan, dan catatan diskusi dianalisis melalui pengelompokan tematik. Karena data kuantitatif yang tersedia berupa nilai agregat per aspek, analisis pada tingkat peserta individual belum dapat disajikan dan dicatat sebagai keterbatasan dalam evaluasi program ini.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh seluruh 25 peserta yang terdaftar. Pada sesi awal, peserta menunjukkan pemahaman umum bahwa koperasi perlu memiliki catatan keuangan, namun belum mengetahui tata cara memisahkan jenis transaksi, mengelola kartu anggota, dan menghitung SHU. Hasil *pretest* memperlihatkan skor rata-rata sebesar 41 dari skala 100, dengan capaian terendah berada pada aspek keterampilan menyusun laporan SHU dan penggunaan template lembar kerja. Setelah seluruh rangkaian pelatihan, praktik mandiri, dan pendampingan selesai dilaksanakan, skor rata-rata *posttest* meningkat menjadi 81, atau mengalami kenaikan sebesar 40 poin pada skala 0–100. Rekapitulasi hasil evaluasi pengetahuan per aspek disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Pengetahuan dan Keterampilan Peserta

No	Aspek yang diukur	Pretest	Posttest	Perubahan (poin)
1	Pemahaman fungsi administrasi dan akuntabilitas koperasi	45	80	+35
2	Pencatatan kas masuk dan kas keluar	50	90	+40
3	Pencatatan simpanan, pinjaman, dan angsuran anggota	45	85	+40
4	Pengetahuan penyusunan laporan keuangan sederhana	40	80	+40
5	Keterampilan menyusun laporan SHU dan menggunakan template	25	70	+45
	Rata-rata keseluruhan	41	81	+40

Peningkatan terbesar terjadi pada aspek keterampilan menyusun laporan SHU dan menggunakan template lembar kerja, yaitu sebesar 45 poin, yang sekaligus merupakan aspek dengan nilai awal paling rendah. Sebaliknya, peningkatan terendah tercatat pada aspek pemahaman fungsi administrasi dan akuntabilitas koperasi sebesar 35 poin, yang merupakan aspek paling teoretis di antara kelima aspek yang diuji. Pola ini menunjukkan bahwa materi keterampilan prosedural yang dipraktikkan secara langsung lebih cepat diserap oleh peserta dibandingkan materi yang bersifat konseptual. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini menghasilkan keluaran administratif fisik yang dapat diverifikasi secara objektif. Buku kas masuk dan kas keluar Koperasi Merah Putih Desa Karangjaya terisi secara lengkap untuk periode transaksi semester I tahun 2026. Dokumentasi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela terdata rapi pada kartu simpanan, sementara riwayat pinjaman, angsuran pokok, dan jasa pinjaman tercatat pada kartu pinjaman dan angsuran masing-masing anggota. Laporan kas dan laporan SHU sederhana untuk periode berjalan juga berhasil disusun secara mandiri oleh pengurus melalui supervisi tim pelaksana. Pada akhir sesi pelatihan, tujuh format administrasi beserta template lembar kerja dan modul panduan diserahkan kepada pengurus koperasi dan mitra sebagai pedoman operasional berkelanjutan. Guna menjamin keberlanjutan sistem tersebut di tingkat desa, dibentuk tim administrasi inti beranggotakan tiga orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harian, sehingga tata kelola tidak bertumpu pada satu individu. Suasana penyampaian materi administrasi dan pencatatan kas disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sesi Pelatihan Administrasi dan Pencatatan Transaksi Koperasi

Pelaksanaan pelatihan dilanjutkan dengan sesi interaktif ketika peserta secara langsung mengaplikasikan format administrasi ke dalam data riil koperasi. Proses pendampingan praktik pencatatan mandiri oleh peserta tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Praktik Pengisian Buku Kas dan Kartu Anggota oleh Peserta

Rangkaian kegiatan di balai desa diakhiri dengan evaluasi akhir dan serah terima dokumen kerja bersama seluruh pemangku kepentingan koperasi, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan

Selama pelaksanaan praktik, tim pelaksana mencatat empat kendala utama yang dihadapi peserta di lapangan. Pengurus belum terbiasa melakukan pencatatan transaksi secara rutin sehingga sejumlah transaksi harian sempat terlewat pada awal pendampingan. Peserta juga mengalami kesulitan dalam memisahkan pencatatan angsuran pokok dan jasa pinjaman, yang berdampak langsung pada ketepatan kalkulasi sisa piutang anggota. Masalah lain yang cukup krusial adalah masih tercampurnya kas operasional koperasi dengan keuangan pribadi pengurus, serta keterbatasan literasi komputer yang menghambat operasionalisasi template lembar kerja berumus secara mandiri. Mengatasi kendala tersebut, tim pelaksana menerapkan formulir buku kas yang lebih ringkas, menunjuk penanggung jawab pencatatan harian, menyediakan kartu

pinjaman berkolom terpisah antara pokok dan jasa melalui latihan berulang, memperkenalkan bukti kas bernomorurut beserta map arsip bulanan, serta menyediakan format manual berstruktur identik bagi pengurus yang belum terbiasa mengoperasikan komputer. Pemeriksaan dokumen menggunakan rubrik evaluasi memperlihatkan beberapa pola kesalahan pembukuan pada fase awal pelatihan. Kesalahan yang paling dominan adalah penggabungan nilai angsuran anggota dalam satu angka tanpa pemisahan pokok dan jasa, yang diperbaiki dengan membedah rincian pembayaran ke dalam kolom terpisah pada kartu pinjaman. Selain itu, setoran simpanan wajib kerap tercampur ke dalam kolom simpanan sukarela, yang diselesaikan melalui penegasan kembali definisi ketiga jenis simpanan disertai simulasi pencatatan kasus. Kesalahan lain mencakup pengeluaran operasional tanpa bukti fisik pendukung, yang diatasi melalui kewajiban pengarsipan kuitansi bernomorurut, serta terjadinya selisih antara saldo buku kas dan kas fisik akibat keterlambatan mencatat. Permasalahan selisih kas tersebut diselesaikan melalui penetapan jadwal tutup kas harian dan rekonsiliasi fisik secara berkala. Melalui pendampingan intensif, seluruh dokumen yang semula berada pada kategori sebagian sesuai berhasil ditingkatkan hingga memenuhi kategori sesuai pada akhir program. Monitoring berkala pada Agustus 2026 membuktikan bahwa aktivitas pembukuan tetap berjalan konsisten pascapelatihan. Buku kas terus diperbarui untuk transaksi bulan Juli dan Agustus 2026, kartu simpanan anggota bertambah seiring masuknya setoran baru, dan rekapitulasi bulanan berhasil disusun oleh tim administrasi inti secara mandiri dengan konsultasi daring berkala. Pemeriksaan pada evaluasi lapangan terakhir menunjukkan bahwa seluruh transaksi yang dibukukan telah dilengkapi dengan bukti kas bernomorurut. Perkembangan ini mengindikasikan awal terbentuknya kebiasaan tertib administrasi, meskipun periode pemantauan selama satu bulan masih memerlukan tindak lanjut jangka panjang untuk menguji ketahanan sistem kerja tersebut.

4.2 Pembahasan

Hasil intervensi membuktikan bahwa pelatihan partisipatif yang dipadukan dengan praktik data riil dan pendampingan berkala efektif menjembatani kesenjangan antara penguasaan teori dan penerapan teknis pembukuan. Nilai awal *pretest* sebesar 41 mencerminkan bahwa pengurus memulai program dari dasar pengetahuan administrasi yang minim. Kenaikan sebesar 40 poin mengindikasikan transformasi nyata dari ketiadaan tata kelola menjadi kelembagaan yang memiliki sistem operasional terstruktur, bukan sekadar perbaikan marginal atas kebiasaan lama. Pola ini sejalan dengan temuan Sumatriani *et al.* (2025) mengenai efektivitas pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi Merah Putih, studi Refianto (2026) mengenai peningkatan kapasitas pengurus berbasis pelatihan aplikatif, serta hasil kajian Muslim *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa pelatihan akuntansi praktis efektif menumbuhkan kesadaran akuntabilitas pada organisasi berbasis komunitas. Ditinjau dari dinamika antaraspek, materi prosedural mengenai perhitungan SHU dan penggunaan template mengalami lonjakan tertinggi karena bersentuhan langsung dengan simulasi data transaksi nyata, sehingga memberikan pemahaman konkret yang mudah direplikasi peserta. Sebaliknya, aspek pemahaman konseptual tata kelola dan akuntabilitas mencatat kenaikan paling rendah. Fenomena ini menegaskan proposisi Rizki *et al.* (2024) dan Sunaryo *et al.* (2023) bahwa internalisasi nilai akuntabilitas kelembagaan membutuhkan proses pembiasaan praktik dan pengalaman mempertanggungjawabkan laporan kepada anggota secara nyata, tidak cukup dibangun melalui penyampaian materi searah di kelas. Keluaran administratif yang dihasilkan memperkuat temuan tersebut. Ketersediaan buku kas, kartu simpanan dan pinjaman anggota, serta laporan kas dan laporan SHU yang terverifikasi menjadi fondasi utama penegakan transparansi kelembagaan (Rubiyanty *et al.*, 2025). Pertanggungjawaban organisasi kepada anggota hanya dapat berjalan kredibel apabila didukung oleh data keuangan tertulis yang teratur. Penyediaan perangkat ganda dalam versi manual dan lembar kerja terkomputerisasi dengan struktur kolom identik terbukti menjadi jembatan yang efektif bagi peserta dengan literasi digital terbatas. Temuan ini mendukung strategi Endarti & Candra (2026) mengenai pentingnya pendekatan bertahap dalam adopsi teknologi pencatatan, sekaligus menegaskan argumen Murdiono *et al.* (2025), Susanti *et al.* (2025), serta Setiajatnika & Hidayat (2026) bahwa modernisasi sistem akuntansi digital pada koperasi pedesaan harus diposisikan sebagai proses berjenjang, bukan intervensi mendadak yang mengabaikan kesiapan pengguna.

Identifikasi hambatan di lapangan memperlihatkan bahwa kendala utama administrasi koperasi desa didominasi oleh faktor kebiasaan dan budaya organisasi daripada kelemahan kognitif semata. Persoalan percampuran kas koperasi dengan dana pribadi pengurus, misalnya, memerlukan penegakan disiplin pemisahan fisik kas dan pencatatan bukti transaksi secara konsisten. Demikian pula penanganan kesalahan pemisahan angsuran pokok dan jasa terbukti lebih efektif diselesaikan melalui perbaikan desain formulir kartu pinjaman daripada sekadar ceramah teori akuntansi. Pembelajaran ini menegaskan pentingnya model pendampingan berkelanjutan sebagaimana diuraikan oleh Kamil *et al.* (2025), Andiena *et al.* (2024), dan Suropto *et al.* (2023), bahwa penyempurnaan desain instrumen kerja secara praktis dapat meminimalkan risiko kesalahan pembukuan. Meskipun menunjukkan hasil positif, capaian program ini harus diinterpretasikan secara proporsional. Keberhasilan yang terverifikasi saat ini masih berfokus pada luaran jangka pendek, meliputi penguasaan keterampilan teknis, tersedianya dokumen administrasi, dan terbentuknya tim pengelola harian. Dampak jangka menengah dan panjang terhadap peningkatan kepercayaan anggota, likuiditas simpanan, kepatuhan pembayaran angsuran, maupun pertumbuhan nominal SHU belum dapat disimpulkan karena memerlukan periode observasi multi-tahun.

Sejumlah keterbatasan metodologis kegiatan ini perlu dicatat. Rancangan evaluasi menggunakan model satu kelompok tanpa kelompok pembanding (*one-group pretest-posttest design*) menyebabkan perubahan skor belum dapat sepenuhnya diatribusikan murni pada intervensi program. Uji instrumen evaluasi terbatas pada validitas isi dan keterbacaan tanpa pengujian reliabilitas statistik. Selain itu, rentang waktu pemantauan baru mencakup satu bulan pascapelatihan sehingga belum merekam satu siklus tahun buku penuh hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Lingkup program juga baru diterapkan pada satu entitas koperasi desa, data evaluasi masih tersaji secara agregat per aspek tanpa pelacakan capaian individual, serta materi pelaporan masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya mengadopsi standar akuntansi formal SAK EP. Menindaklanjuti keterbatasan tersebut, pendampingan tahap berikutnya perlu diarahkan pada penyelarasan format laporan keuangan menuju Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sesuai tuntutan regulasi pelaporan modern (Setiajatnika & Hidayat, 2025). Prioritas kerja lanjutan juga mencakup pendampingan persiapan pembukuan tutup tahun menjelang RAT 2026, pelatihan penilaian kelayakan pinjaman guna memitigasi risiko kredit macet, serta perluasan replikasi modul ke desa binaan lainnya bersama mitra Kawan Lokal. Evaluasi pada periode berikutnya disarankan melacak parameter operasional yang lebih mendalam, seperti tingkat kepatuhan waktu pelaporan bulanan, kelengkapan arsip bukti transaksi, persentase pemutakhiran kartu anggota, pengujian keterampilan individual, serta pemantauan konsistensi sistem pembukuan dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan ke depan.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian di Desa Karangjaya berhasil menjembatani pemahaman konseptual pengurus mengenai pentingnya akuntabilitas menjadi praktik administrasi keuangan koperasi yang terdokumentasi secara tertib. Pelatihan dan pendampingan yang melibatkan 25 peserta ini meningkatkan skor rata-rata pengetahuan dari 41 menjadi 81 (naik 40 poin pada skala 0–100), dengan lompatan capaian tertinggi pada aspek penyusunan laporan SHU dan penggunaan template lembar kerja. Luaran nyata jangka pendek program mencakup terisinya buku kas koperasi periode semester I tahun 2026, ketersediaan kartu simpanan dan kartu pinjaman anggota, tersusunnya laporan kas dan laporan SHU sederhana secara mandiri oleh pengurus, serah terima tujuh format administrasi beserta modul pelatihan, serta pembentukan tim administrasi inti beranggotakan tiga orang. Kendala utama di lapangan didominasi oleh faktor kebiasaan mencatat yang belum rutin, kesulitan memisahkan komponen angsuran pokok dan jasa, percampuran dana koperasi dengan keuangan pribadi pengurus, serta keterbatasan literasi digital. Selain itu, keterbatasan program mencakup rancangan evaluasi satu kelompok tanpa kelompok pembanding, ketiadaan uji reliabilitas instrumen secara statistik, periode pemantauan yang belum mencakup satu siklus tahun buku penuh, lingkup intervensi yang terbatas pada satu entitas desa, serta ketiadaan data keterampilan individual, sehingga dampak jangka menengah terhadap penguatan modal dan kepercayaan anggota belum dapat dinilai secara definitif. Keberlanjutan sistem tata kelola ini direkomendasikan melalui optimalisasi fungsi tim administrasi inti, penegakan disiplin pencatatan harian yang dibarengi pemeriksaan berkala oleh mitra pendamping, serta transparansi pelaporan rutin kepada seluruh anggota. Agar rencana pengawalan pascakegiatan dapat terlaksana secara terstruktur, agenda tindak lanjut dipetakan ke dalam penanggung jawab dan target waktu pelaksanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut, Penanggung Jawab, dan Target Waktu

Tindak lanjut	Penanggung jawab	Target waktu
Pencatatan transaksi harian dan rekapitulasi bulanan	Tim administrasi inti koperasi (tiga orang), dikoordinasikan oleh bendahara	Berjalan setiap bulan
Pemeriksaan berkala atas kelengkapan bukti dan kesesuaian saldo kas fisik	Pengawas koperasi bersama mitra Kawan Lokal	Setiap triwulan
Penyusunan laporan keuangan berstandar SAK EP	Tim pelaksana Universitas Mayasari Bakti bersama pengurus koperasi	Semester berikutnya
Pendampingan persiapan pembukuan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	Pengurus koperasi di bawah supervisi tim pelaksana	Menjelang tutup buku tahun 2026
Penguatan analisis kelayakan pinjaman anggota	Tim pelaksana bersama pengurus unit simpan pinjam	Semester berikutnya
Replikasi sistem administrasi pada koperasi desa binaan lain	Mitra Kawan Lokal dengan dukungan tim pelaksana	Tahun berikutnya
Evaluasi keterampilan individual dan pemantauan keberlanjutan	Tim pelaksana pengabdian	Tiga hingga enam bulan setelah kegiatan

Pelaksanaan program pengabdian selanjutnya disarankan menerapkan instrumen evaluasi keterampilan berbasis individu dengan periode pemantauan longitudinal yang lebih panjang guna mengukur resistensi kebiasaan mencatat.

Selain itu, pelibatan kelompok kontrol atau koperasi pembanding sangat dianjurkan agar atribusi dampak intervensi dapat dibuktikan secara lebih kuat dan teruji secara metodologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mayasari Bakti atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan program melalui Kontrak Nomor 024/SK-PKM/LPPM/UMB/VI/2026. Terima kasih juga disampaikan kepada Kawan Lokal Kabupaten Tasikmalaya selaku mitra kegiatan, Pemerintah Desa Karangjaya, serta pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Desa Karangjaya atas partisipasi aktif dalam identifikasi kebutuhan, pelaksanaan praktik, dan evaluasi kegiatan.

REFERENSI

- Andiena, P. A., Putri, N., Andi, S., Bumandava, P., Edy, E., & Siddiq, H. (2024). Pengelolaan keuangan koperasi yang efisien: Pelatihan penyusunan laporan keuangan yang transparan. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3), 4–10.
- Delima, I. P., Latifa, M., Putri, H. A., Oktavianti, W., Azizah, F., Mahdalena, Z., Ridho, I. A., & Zora, F. (2026). Sinergi Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan non-bank dalam penguatan tata kelola ekonomi desa di Indonesia. *IndoMathEdu Intellectuals Journal*, 7(1), 773–786. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4988>
- Endarti, S., & Candra, Y. T. A. (2026). Pendampingan dan pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis aplikasi digital UMKM Kabupaten Klaten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 5(4), 1419–1434. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v5i04.2672>
- Junaidi, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih berhasil. *Jurnal Economina*, 4(11), 422–434. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i11.1802>
- Kamil, I., Anjarwati, S., & Irawan, I. A. (2025). Edukasi pelaporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru*, 6(1), 18–23. <https://doi.org/10.54147/jpkm.v6i01>
- Marzuki, A., Malagano, T., Muhadi, Herlambang, D., Susanti, I., Sukardi, D., & Dharfhia, N. (2026). Pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 14–22.
- Megasyara, I., Wibowo, R., Febrianti, D., Bait, J. F., & Hakim, A. L. (2025). Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih menuju kinerja yang berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 9–15. <https://doi.org/10.31967/jpm.v6i1.1684>
- Murdiono, A., Zen, F., & Subagyo. (2025). Transformation of cooperative financial governance through implementation of Cooperative Accounting Information System (SIKOP) based on SAK EP in Blitar Regency. *Journal of Sustainable Community Service*, 5(2), 84–89. <https://doi.org/10.55047/jscs.v5i2.967>
- Muslim, M., Sonjaya, Y., & Prasetyaningrum, S. (2025). Community accounting school: Basic accounting training for administrators of cooperatives, foundations and community organizations. *Advances in Community Services Research*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.60079/acsr.v3i2.628>
- Nasihin, I., Purwandari, D., Ardiansyah, H. N., Prawatiningsih, D., & Kartika, E. (2026). Pendampingan laporan keuangan koperasi desa merah putih. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 112–121.
- Palasari, R. S., Wijayanti, D. I., & Safitri, A. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pencatatan keuangan sederhana: Studi kasus pada binaan BAZNAS. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2779–2787. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2053>

- Rahmadhani, C., & Astuti, T. (2024). Pelatihan pencatatan laporan keuangan sederhana pada UMKM di Kecamatan Nanggulan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), 45–53. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.955>
- Refianto, E. (2026). Peningkatan kompetensi pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pelatihan inovasi digital di Kota Blitar. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 765–774. <https://doi.org/10.60004/komunita.v5i2.639>
- Rizki, N., Ridhawati, R., & Prasedya, T. (2024). Good corporate governance in cooperatives organization: Lesson learn from Indonesia. *New Applied Studies in Management, Economics & Accounting*, 7(1), 55–66. <https://doi.org/10.22034/NASMEA.2024.181225>
- Rubiyanty, I. M., Mubaroq, A. C., & Rafinda, A. (2025). The effect of accountability and transparency on cooperative financial management of Sakra Warih Conventional Consumer Cooperative of Banyumas Regency. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(1), 491–500. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2400>
- Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. *J-Coop: Journal of Co-operative*, 1(2), 177–188.
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2026). Kesiapan digitalisasi akuntansi koperasi dalam menerapkan SAK Entitas Privat. *J-Coop: Journal of Co-operative*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.32670/jc.v2i1.50>
- Sumatriani, Usman, A., Iqbal, M., Syam, S., Nurachmah, A. E., Hamid, A., Indira, M., & Taslim, P. A. (2025). Penguatan literasi keuangan: Pengelolaan keuangan Koperasi Merah Putih. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (SNP2M) 2025* (Vol. 9, hlm. 261–266). Makassar: Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Sunaryo, K., Sri Hastuti, E. K., & Kusumawardhani, I. (2023). Implementation of good corporate governance in cooperatives: A study in Yogyakarta Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(4), 177–190. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i04.26>
- Suripto, S., Prasetya, V., & Hartoyo, H. (2023). Pelatihan peningkatan keterampilan penyusunan laporan keuangan untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Semesta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 202–210. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i3.127>
- Susanti, A., Arief, S., Budiantoro, R. A., & Khaira, M. (2025). Penguatan tata kelola koperasi berbasis digital di Desa Wisata Candirejo Magelang: Upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 4(2), 151–158.